

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia menanggapi dengan aktif dalam melakukan upaya diplomasi ekonomi terhadap India dalam menyikapi ketidakpastian kebijakan tarif masuk CPO pada periode 2017-2020. India merupakan pasar yang potensial bagi komoditas CPO asal Indonesia, namun pasca diberlakukannya kebijakan tarif masuk CPO di India yang cenderung tidak pasti sejak Agustus 2017 telah menyebabkan jumlah kuantitas dan nilai ekspor CPO asal Indonesia ke India cenderung mengalami penurunan. Asosiasi pengusaha seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bahkan telah mengajukan keluhan tersebut kepada India. Sebenarnya kebijakan tarif masuk yang cenderung tidak pasti bahkan tinggi tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan *Make In India* yang bertujuan untuk mendorong dan melindungi perkembangan industri dalam negeri.

Kebijakan tarif masuk CPO di India yang cenderung tidak pasti dapat dikatakan sebagai hambatan tarif perdagangan antara Indonesia dengan India. Hal tersebut sejalan dengan konsep hambatan tarif dimana adanya kebijakan tersebut berdampak nyata kepada terjadinya hambatan perdagangan seperti terjadinya penurunan jumlah kuantitas dan nilai ekspor CPO asal Indonesia ke India. Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan hambatan tarif tersebut pemerintah Indonesia telah melakukan upaya diplomasi ekonomi. Upaya diplomasi ekonomi yang telah dilakukan di sini adalah dengan menggunakan salah satu jenis diplomasi ekonomi seperti *economic diplomacy*. Sejalan dengan teori diplomasi ekonomi dimana *economic diplomacy* di sini adalah salah satu jenis diplomasi ekonomi dengan menggunakan negara sebagai aktor utamanya. Pada periode 2017-2020 tercatat pemerintah Indonesia telah melakukan upaya diplomasi ekonomi pada level *government to government* seperti melalui pertemuan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2017, pertemuan ke-2 Biennial Trade Ministers Forum pada 2017, pertemuan di Hotel Taj Diplomatic Enclave pada 2018, pertemuan

di Istana Merdeka Jakarta pada 2018, pertemuan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada 2019, pertemuan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-India pada 2019, pertemuan di New Delhi pada 2020, dan pertemuan ke-3 Biennial Trade Ministers Forum pada 2020 serta telah melakukan upaya diplomasi ekonomi pada level *government to business* kepada pihak India seperti melalui pertemuan Indonesia-India Business Forum on Palm Oil di Mumbai pada 2017, pertemuan Tingkat Tinggi di Jakarta pada 2018, pertemuan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 2018, pertemuan Indonesia-India Palm Oil Joint Working Group pada 2019, pertemuan Joint Commission Meeting RI-India ke-6 pada 2019, dan pertemuan di New Delhi, India pada 2020. Melalui beberapa pertemuan tersebut pemerintah Indonesia berperan sebagai aktor utama diplomasi ekonomi dan selalu berusaha untuk melakukan negosiasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan hambatan tarif perdagangan CPO antara Indonesia dengan India.

Kemudian, hasil yang diperoleh Indonesia melalui upaya diplomasi ekonomi tersebut adalah terjadinya penurunan tarif masuk CPO di India secara perlahan dan sekaligus mampu menghasilkan berbagai kerjasama baru antara pemerintah Indonesia dengan India terkait sektor industri kelapa sawit. Walaupun upaya diplomasi ekonomi yang telah dilakukan cukup aktif, namun di dalam prakteknya terdapat beberapa tantangan. Beberapa tantangan tersebut seperti sulitnya melakukan perundingan dagang dengan India, belum terciptanya perjanjian dagang secara bilateral yang tetap di antara Indonesia dengan India, dan adanya perbedaan pandangan antara kementerian terkait dalam menyikapi permasalahan dagang tersebut. Oleh karena itu, walaupun upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan cukup aktif, namun bukan berarti tidak terdapat tantangan di dalam implementasinya.

6.2. Saran

6.2.1. Saran Praktis

Pemerintah Indonesia sudah cukup aktif dalam melakukan upaya diplomasi ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan hambatan tarif perdagangan CPO antara Indonesia dengan India, namun di dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan. Beberapa tantangan diplomasi ekonomi tersebut, antara lain; pertama, sulitnya untuk melakukan perundingan dagang dengan India. Dalam menyelesaikan tantangan ini pemerintah Indonesia perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah India dalam rangka menemukan komoditas kunci asal India yang dapat dijadikan sebagai alat diplomasi ekonomi, sehingga mampu sejalan dengan prinsip imbal dagang. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan konsep hambatan tarif khususnya terkait strategi penyelesaian hambatan tarif dengan menggunakan komoditas kunci negara tujuan dalam upaya melakukan diplomasi ekonomi. Kedua, belum terciptanya perjanjian dagang CPO secara bilateral yang tetap di antara Indonesia dengan India. Dalam menyelesaikan tantangan ini pemerintah Indonesia perlu lebih berkomitmen dan aktif dalam melakukan *joint study* dengan pemerintah India, sehingga mampu menciptakan perjanjian dagang bilateral di antara kedua negara. Ketiga, adanya perbedaan pandangan antara kementerian terkait dalam menyikapi permasalahan dagang tersebut. Dalam menyelesaikan tantangan ini pemerintah Indonesia perlu lebih meningkatkan peran dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam rangka mengkoordinasikan antara kementerian terkait, sehingga mampu menemukan titik tengah di tengah perbedaan kepentingan dan pandangan yang ada.

6.2.2. Saran Teoritis

Penelitian terkait diplomasi ekonomi Indonesia dalam menyikapi ketidakpastian tarif masuk CPO di India periode 2017-2020 dengan menggunakan teori diplomasi ekonomi beserta konsep CPO dan hambatan tarif sebagai pisau analisis sudah tepat. Namun, masih diperlukannya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan konsep negosiasi dan teori *two-level games*. Hal ini dilakukan dalam

rangka menganalisis bagaimana negosiasi yang dilakukan di setiap perundingan terkait hambatan tarif perdagangan CPO antara Indonesia dengan India serta lebih mampu memberikan input baru terkait bagaimana strategi negosiasi yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi hambatan tarif perdagangan tersebut. Selain itu, juga diperlukannya penelitian lebih lanjut yang bersifat kuantitatif. Hal ini dilakukan untuk dapat mengukur lebih dalam terkait bagaimana pengaruh ketidakpastian tarif masuk CPO yang diberlakukan oleh pemerintah India terhadap jumlah kuantitas dan nilai ekspor CPO Indonesia ke India, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap terkait kinerja ekspor CPO Indonesia ke India di tengah ketidakpastian tarif masuk CPO yang berlaku khususnya pada periode 2017-2020.